

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai dinamika ekonomi Provinsi Kalimantan Utara sebelum dan sesudah pemekaran.

1. Potensi ekonomi Kalimantan Utara mengalami perubahan. Sebelum pemekaran, perekonomian wilayah studi masih sangat didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian (LQ 3,99) serta industri pengolahan (LQ 1,01), sedangkan sektor lainnya berperan sebagai sektor pendukung dengan kontribusi relatif kecil. Ketergantungan yang tinggi pada dua sektor ini tercermin dari tingginya kontribusi dan daya saing pertambangan dibanding sektor lain. Sesudah pemekaran, terjadi diversifikasi struktur ekonomi dengan peningkatan jumlah sektor basis dari dua menjadi lima sektor, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; konstruksi; transportasi dan pergudangan; serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (LQ > 1 dan banyak yang memiliki Cij positif). Perubahan ini menunjukkan bahwa pergeseran dari struktur ekonomi yang sangat terkonsentrasi pada pertambangan menuju struktur yang lebih beragam dan relatif lebih tahan terhadap guncangan eksternal.
2. Kontribusi sektoral, daya saing, dan perubahan struktur ekonomi menunjukkan dinamika transformasi yang kompleks dalam basis ekonomi

Kalimantan Utara. Analisis kontribusi sektoral menunjukkan bahwa sektor pertambangan tetap menjadi penyumbang terbesar meskipun mengalami penurunan drastis dari 39.766,57 (12,04%) menjadi 2.778,60 (5,10%). Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat menjadi sektor kedua terbesar, diikuti peningkatan signifikan dari sektor transportasi dan pergudangan serta konstruksi.

Daya saing sektoral menunjukkan pola sejalan dengan perubahan kontribusi. Daya saing sektor pertambangan turun dari (27.418,42 menjadi 1.640,29), mengindikasikan hilangnya keunggulan kompetitif. Sektor pertanian kehutanan dan perikanan menunjukkan peningkatan daya saing dari (331,74 menjadi 713,02), dan sektor industri pengolahan berubah dari posisi negatif (-26.973,39) menjadi positif (292,69). Ini menunjukkan perkembangan keunggulan kompetitif di sektor-sektor non tambang yang lebih berkelanjutan.

Perubahan struktur ekonomi menunjukkan output ekonomi beralih dari dominasi pertambangan menuju sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi. Kalimantan Utara telah mengalami transformasi dari ekonomi berbasis ekstraksi menuju ekonomi diversifikasi. Meskipun demikian, sektor-sektor jasa seperti jasa keuangan dan asuransi masih tertinggal dan memerlukan perhatian khusus.

3. Klasifikasi ekonomi berdasarkan tipologi klassen menunjukkan peningkatan jumlah sektor yang masuk kategori maju dan tumbuh pesat (kuadran I) sesudah pemekaran. Sebelum pemekaran, hanya sektor pertambangan dan penggalian yang termasuk (kuadran I) sektor maju dan

tumbuh cepat, sedangkan mayoritas sektor lain berada di kuadran III (potensial berkembang) dan kuadran IV (relatif tertinggal). Sesudah pemekaran, jumlah sektor yang masuk kategori kuadran I (maju dan tumbuh pesat) meningkat, yaitu pertambangan dan penggalian; pertanian, kehutanan, perikanan; konstruksi; transportasi dan pergudangan; serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sektor-sektor baru seperti industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya menempati kuadran III, sedangkan jasa keuangan dan asuransi, real estate, dan jasa perusahaan masih di kuadran IV. Pemekaran telah menggeser beberapa sektor, menunjukkan diversifikasi dan peningkatan ketahanan ekonomi daerah, meskipun sektor jasa keuangan dan perusahaan masih memerlukan intervensi kebijakan untuk mengejar ketinggalan.

4. Sebelum pemekaran, kebijakan pembangunan ekonomi Kalimantan Timur yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, khususnya pertambangan, sejalan dengan dominasi pertambangan dalam struktur ekonomi wilayah studi, tetapi menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas. Sesudah pemekaran, kebijakan pembangunan Kalimantan Utara yang lebih mendorong sektor pertanian, konstruksi, transportasi, dan administrasi pemerintahan sejalan dengan temuan empiris berupa bertambahnya sektor basis non tambang dan membaiknya sebaran kontribusi sektoral. Namun, masih terdapat kesenjangan pada penguatan ekosistem pendukung seperti jasa keuangan, real estate, dan jasa

perusahaan, yang terlihat dari tetap rendahnya kontribusi dan daya saing sektor-sektor tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemekaran membuka ruang kebijakan yang lebih luas dan sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih beragam, tetapi masih diperlukan strategi lanjutan untuk memperkuat sektor-sektor penunjang dan koordinasi kebijakan antar wilayah pemerintahan agar transformasi ekonomi wilayah studi dapat berlangsung lebih berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, pada bagian ini diajukan rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu memprioritaskan penguatan sektor basis non tambang, khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan; konstruksi; serta transportasi dan pergudangan, yang telah terbukti memiliki $LQ > 1$ dan C_{ij} positif. Kebijakan dapat diarahkan pada pengembangan agribisnis terintegrasi, pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik antardaerah, serta belanja publik yang mendukung kegiatan produktif dan UMKM di sektor-sektor tersebut. Langkah ini penting untuk memperkuat struktur ekonomi yang lebih beragam dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada sektor pertambangan.
2. Mengingat peran sektor pertambangan yang masih kuat tetapi kontribusinya cenderung menurun secara relatif, diperlukan reorientasi pemanfaatannya dari sekadar sumber pertumbuhan jangka pendek menjadi sumber pembiayaan bagi pengembangan sektor lain. Pemerintah daerah perlu

mengarahkan sebagian penerimaan dari sektor pertambangan untuk investasi di infrastruktur produktif, pengembangan sumber daya manusia, serta mendorong hilirisasi agar tercipta nilai tambah yang lebih tinggi. Pengaturan lingkungan yang ketat juga diperlukan agar aktivitas pertambangan tidak mengurangi potensi sektor lain seperti pertanian dan kehutanan berkelanjutan.

3. Sektor jasa keuangan dan asuransi, real estate, dan jasa perusahaan perlu mendapatkan perhatian khusus karena masih memiliki kontribusi dan daya saing yang rendah serta berada di kuadran IV Tipologi Klassen. Pemerintah daerah dapat mendorong penguatan ekosistem keuangan dan jasa melalui perluasan akses layanan keuangan formal bagi pelaku usaha, pengembangan kawasan komersial yang mendukung perdagangan dan logistik, serta peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya layanan profesional. Penguatan sektor-sektor ini diharapkan dapat melengkapi transformasi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju ekonomi yang lebih modern dan berdaya saing.
4. Koordinasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah studi penting dilakukan agar pengembangan sektor ekonomi unggulan tidak berjalan sendiri-sendiri. Penyusunan dokumen perencanaan ke depan perlu mempertimbangkan hasil analisis LQ, Shift Share, dan Tipologi Klassen sebagai dasar penetapan prioritas sektor.